



## PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO

---

PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO  
NOMOR 7 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI RUMAH PEMOTONGAN HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA MOJOKERTO

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 2 Tahun 1999 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan perlu disesuaikan ;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, maka dipandang perlu mengatur kembali Retribusi Rumah pemotongan hewan yang ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat ;
2. Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104) ;
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;

5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
8. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3242) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3253) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;

14. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
18. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 1 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Dengan persetujuan bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA MOJOKERTO**

dan

**WALIKOTA MOJOKERTO**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO  
TENTANG • RETRIBUSI RUMAH PEMO-  
TONGAN HEWAN**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kota, adalah Kota Mojokerto ;
- b. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Mojokerto ;
- c. Walikota adalah Walikota Mojokerto ;

- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto ;
- e. Dinas Pendapatan, adalah Dinas Pendapatan Kota Mojokerto ;
- f. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu secara struktural, teknis dan operasional di bidang Retribusi Daerah atas dasar peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan ;
- g. Kas Daerah, adalah Kas Daerah Kota Mojokerto ;
- h. Bendaharawan Khusus Penerima untuk selanjutnya disingkat BKP, adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas Pendapatan Kota Mojokerto
- i. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberi oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan ;
- j. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya ;
- k. Juru Periksa Daging, ialah Pegawai Pemerintah Daerah yang telah memperoleh pendidikan khusus mengenai pemeriksaan daging dan bertugas melakukan pemeriksaan daging yang akan menjadi konsumsi masyarakat baik untuk dijual atau untuk keperluan hajat ;
- l. Retribusi Pemeriksaan dan Pematangan Hewan adalah retribusi yang dipungut atas pelayanan pemeriksaan kesehatan dan pematangan hewan ;

- m. Rumah Pemotongan Hewan adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan disain tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan selain unggas bagi konsumsi masyarakat luas ;
- n. Hewan ialah sapi, kerbau, kuda, kambing, domba dan babi ;
- o. Petugas Ahli ialah Dokter Hewan yang bertugas di Kota Mojokerto atau Petugas lain dibawah pengawasan dan tanggung jawab Dokter Hewan dimaksud yang berdasarkan pendidikan dan pengetahuannya ditetapkan sebagai Petugas pemeriksa pada rumah pemotongan hewan ;
- p. Ternak besar bertanduk betina produktif adalah sapi/kerbau betina yang masih dapat dimanfaatkan sebagai bibit ternak ;
- q. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial ;
- r. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Daerah ;
- s. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
- t. Surat Setoran Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Walikota ;
- u. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKB, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar ;

- e. Pemeriksaan ternak besar bertanduk yang tidak produktif (cap. S).

#### Pasal 4

- (1) Hewan besar bertanduk betina yang akan diPemotongan terlebih dahulu harus diperiksa secara khusus oleh petugas berwenang ;
- (2) Ternak besar bertanduk yang tidak produktif ditandai Cap " S " dan boleh diPemotongan di Rumah Pemotongan Hewan dengan diberi surat hasil pemeriksaan ;
- (3) Ternak besar bertanduk yang dinyatakan masih produktif tidak boleh diPemotongan dengan diberi surat keterangan penolakan.

#### Pasal 5

- (1) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan ternak dan penggunaan fasilitas Rumah Pemotongan Hewan ;
- (2) Wajib Retribusi adalah orang atau badan yang mendapatkan pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan ternak dan penggunaan fasilitas Rumah Pemotongan Hewan dan/ atau yang diwajibkan untuk membayar retribusi.

### BAB III

#### GOLONGAN RETRIBUSI

#### Pasal 6

Retribusi Rumah Pemotongan Hewan termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha.

### BAB IV

#### CARA MENGUKUR TINGKAT PENGUNAAN JASA

#### Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa berdasarkan jenis pelayanan, jenis hewan dan jumlah hewan yang diperiksa/dipotong.

**BAB V**  
**PRINSIP DALAM PENETAPAN STRUKTUR**  
**DAN BESARNYA TARIF**

Pasal 8

Prinsip penetapan dan struktur besarnya tarif Retribusi Rumah Pemotongan Hewan adalah didasarkan kepada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagai pengganti biaya investasi, biaya administrasi, biaya pemeliharaan gedung dan peralatan rumah pemotongan, dan biaya operasional pemeriksaan/pemotongan hewan.

**BAB VI**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

Pasal 9

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Rumah Pemotongan Hewan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Biaya pemeriksaan kesehatan hewan per ekor :
  1. Sapi atau kerbau, sebesar Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah) ;
  2. Kambing atau domba, sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;
  3. Babi, sebesar Rp. 7500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
- b. Biaya pemakaian kandang peristirahatan sapi/kerbau per ekor sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;
- c. Biaya pemakaian tempat pemotongan hewan ternak per ekor :
  1. Sapi atau kerbau, sebesar Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah) ;
  2. Kambing atau domba, sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) ;
  3. Babi, sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

- d. Biaya pemeriksaan ulang kesehatan daging yang berasal dari daerah lain :
1. Daging segar, sebesar Rp. 150,00 (seratus lima puluh rupiah) perkilo-gram ;
  2. Daging beku, sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah) perkilogram ;
  3. Biaya pemeriksaan ulang kesehatan minimal sebesar Rp. 10.000,00 ;
- e. Biaya pemeriksaan ternak besar bertanduk betina yang boleh dipotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, untuk setiap ekornya dikenakan retribusi, sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

## BAB VII

### SAAT RETRIBUSI TERUTANG

#### Pasal 10

Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat pelayanan atau ditetapkan SKRD dan/atau dokumen lain yang dipersamakan.

## BAB VIII

### WILAYAH PEMUNGUTAN

#### Pasal 11

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Kota Mojokerto.

## BAB IX

### TATA CARA PEMUNGUTAN

#### Pasal 12

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ;
- (2) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, disetor ke Kas Daerah melalui BKP pada Kantor Dinas Pendapatan Kota Mojokerto.



**BAB X**  
**SANKSI ADMINISTRASI**

Pasal 13

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

**BAB XI**  
**TATA CARA PEMBAYARAN**

Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus ;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ;
- (3) Tata cara pembayaran, penyeteroran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Walikota.

**BAB XII**  
**PENGURANGAN, KERINGANAN**  
**DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

Pasal 15

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ;
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi ;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Walikota.

## BAB XIII

### TATA CARA PENAGIHAN

#### Pasal 16

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa ;
- (2) Penagihan retribusi dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB XIV

### TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

#### Pasal 17

- (1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi ;
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Walikota ;
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berhak atas pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

#### Pasal 18

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi ;

- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## BAB XVII PENGAWASAN

### Pasal 22

Walikota menunjuk pejabat untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

## BAB XVIII KETENTUAN PIDANA

### Pasal 23

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau dengan setinggi-tingginya 4 (empat) kali retribusi terutang ;
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## BAB XIX PENYIDIKAN

### Pasal 24

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah atau Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;

- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut ;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
- e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, penca-tatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
- d. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
- g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- j. menghentikan penyidikan ;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## BAB XX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 2 Tahun 1999 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan, dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 26

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

### Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto.

Diundangkan di Mojokerto  
Pada tanggal 22 Juli 2002  
SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

Cap. Ttd

Ir. BACHTIAR SUKO KARJADJI  
Pembina Utama Muda  
NIP. 010 178 003

Ditetapkan di Mojokerto  
Pada tanggal 22 Juli 2002  
WALIKOTA MOJOKERTO  
Cap ttd.

TEGOEH SOEJONO, S.H

PENJELASAN  
 ATAS  
 PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO  
 NOMOR 7 TAHUN 2002  
 TENTANG  
 RETRIBUSI RUMAH PEMOTONGAN HEWAN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, dalam rangka memantapkan penyelenggaraan Otonomi Daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab, maka untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan Pembangunan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah khususnya yang berasal dari Retribusi Daerah, perlu ditetapkan Retribusi Rumah Pemotongan Hewan di Kota Mojokerto dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	sampai dengan pasal 8	:	Cukup jelas
Pasal 9	huruf <u>a</u>	:	Cukup jelas
	huruf <u>b</u>	:	Pemakaian kandang peristirahatan dikenakan retribusi karena sesuai syarat teknis, maka ternak yang akan diPemotongan harus diistirahatkan kurang lebih 12 - 24 jam dan kandang yang digunakan terpisah dari kandang yang disewakan (kandang parkir).
	huruf <u>c</u>	:	Cukup jelas
	huruf <u>d</u> angka 1	:	Cukup jelas
	angka 2	:	Cukup jelas

- angka 3 : bahwa untuk pemeriksaan ulang kesehatan daging minimal sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dimaksudkan agar daging yang akan diperiksa tersebut tidak kurang dari 70 kilogram daging segar dan 100 kilogram daging beku.
- huruf e : Cukup jelas
- Pasal 10 sampai dengan Pasal 19 : Cukup jelas
- Pasal 20 ayat (1) : Saat kadaluwarsa penagihan retribusi ini perlu ditetapkan untuk memberikan kepastian hukum kapan utang retribusi tersebut tidak dapat ditagih lagi.
- ayat (2) huruf a : Dalam hal diterbitkan Surat Teguran atau Surat Paksa, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- huruf b : Yang dimaksud dengan pengakuan utang retribusi secara langsung adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- Yang dimaksud dengan pengakuan utang secara tidak langsung adalah Wajib Retribusi tidak secara nyata-nyata langsung menyatakan bahwa ia mengakui utang retribusi kepada Pemerintah Daerah.

Contoh :

- Wajib Retribusi mengajukan permohonan angsuran/penundaan pem-bayaran ;
- Wajib Retribusi mengajukan permohonan keberatan.

Pasal 21 sampai dengan pasal 27 : Cukup jelas